

Dampak Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Impact of Implementation of Economic Empowerment Fund Against Income Communities

Dr. Frits O. Fanggidae, MS
Ronald Patrick Costantin Fanggidae, SE., MM.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Kupang
Jl. Timor Raya 124, Kel. Pasir Panjang - Kota Kupang
Email : balitbangkotakupang@gmail.com

ABSTRACT

Impact of PEM funds towards increasing income of the beneficiaries are significant, although the majority of revenue still used for consumption (51.31%) and the remainder is used to increase business capital (48.69%) . In terms of the principles of empowerment , with the additional capital through the income, recipients PEM start empowering their business well. However , the choice of the type of business has not varied (focus on trading activities), inadequate of business planning and financial management. Because it is recommended that improvements in the implementation of PEM funds focus on expanding business options, and improvements in the planning and financial management as well as.

Keywords :Community Economic Empowerment Fund

ABTRAK

Dampak penyaluran dana PEM terhadap peningkatan pendapatan penerima bantuan terlihat nyata, walaupun sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk konsumsi (51,31%) dan sisanya digunakan untuk menambah modal usaha (48,69%). Dari segi prinsip pemberdayaan, dengan adanya tambahan modal usaha melalui pendapatan tersebut, para penerima dana PEM mulai memberdayakan usahanya dengan baik. Namun demikian, pilihan jenis usaha belum bervariasi (fokus pada usaha dagang), serta perencanaan usaha penatausahaan keuangan belum memadai. Karena itu direkomendasikan agar perbaikan dalam implementasi dana PEM fokus pada perluasan pilihan usaha, serta perbaikan dalam perencanaan dan penatausahaan keuangan.

Kata Kunci : Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

A. Latar Belakang

Berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang, diikhtiarkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas produktif masyarakat, terutama aktivitas produktif berskala mikro dan kecil. Perhatian pada aktivitas produktif skala mikro dan kecil, didasarkan pada realitas bahwa, jumlah warga Kota Kupang yang memiliki usaha skala mikro dan kecil relatif besar, sehingga kemajuan usaha mikro dan kecil tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Namun demikian, disadari bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang implementasinya dilakukan dalam bentuk bantuan permodalan, tidak serta merta meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi membutuhkan proses pengembangan dalam jangka waktu tertentu, barulah tampak pengaruhnya pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, penting diperhatikan tahapan-tahapan pemanfaatan bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Uraian di atas menunjukkan bahwa, peningkatan pendapatan hanya dapat terjadi, bila bantuan permodalan dapat memberbesar skala usaha dan pengelolaan usaha dapat dilakukan secara efisien. Karena itu, kajian pengaruh program pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, hendaknya dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, No, 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka, BALITBANG (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kota Kupang, berinisiatif untuk melakukan suatu kajian dengan topik Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat, paling kurang untuk mendapatkan gambaran akhir, sampai sejauhmana program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut telah berjalan pada tahapan yang benar, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Permasalahan

Mengingat fokus kajian ini hendak mengukur pengaruh program pemberdayaan ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, dan disadari pula bahwa warga Kota Kupang yang mendapatkan bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi belum mewakili seluruh masyarakat Kota Kupang, maka kajian ini dibatasi pada warga Kota Kupang yang pernah mendapat bantuan permodalan dari implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai tahun anggaran 2013. Dengan pembagian demikian, dapat dikaji sampai sejauhmana individu penerima bantuan permodalan, dalam jangka waktu yang relatif pendek, telah mampu mengembangkan usahanya, sehingga memberi dampak pada peningkatan pendapatan.

C. Tujuan dan Keluaran

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka kajian ini bertujuan:

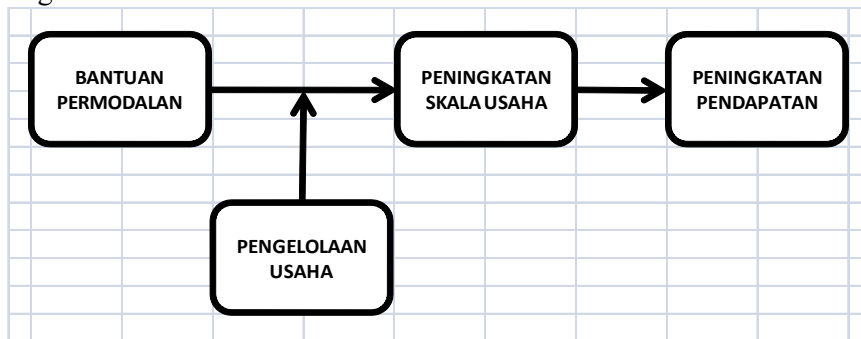
1. Mendeskripsikan bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
2. Menganalisis dampak bantuan permodalan terhadap kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah faktor yang berkaitan dengan kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
4. Merumuskan rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang melalui berbagai SKPD di waktu yang akan datang.

Berdasarkan rumusan tujuan di atas, maka hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Adanya gambaran lengkap tentang bantuan permodalan yang telah disalurkan kepada kelompok/individu melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
2. Adanya gambaran yang lengkap tentang profil usaha kelompok/individu melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
3. Adanya gambaran lengkap tentang dampak bantuan permodalan terhadap kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
4. Teridentifikasinya sejumlah faktor yang berkaitan dengan kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
5. Adanya rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan di waktu yang akan datang.

D. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir

Pemahaman teoretis terhadap dampak implementasi dana PEM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka keterkaitan konsep (kerangka berpikir) sebagai berikut.



Gambar 1

Kerangka Pikir Pengkajian

Dalam arti sempit modal diartikan hanyalah dalam artian uang, sedangkan dalam arti luas modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang misalnya mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya. Modal dapat juga diartikan sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan (Riyanto, 2001). Sedangkan menurut Munawir (2001), modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjuk dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Pengertian modal sebagaimana dikemukakan Riyanto (2001) tepat dijadikan rujukan, terutama dengan penekanannya pada fungsi produktif modal untuk membentuk pendapatan. Dengan kata lain, modal hanya dapat menciptakan pendapatan bila modal tersebut digunakan secara efisien dan efektif (produktif). Hal ini sejalan dengan kerangka pikir di atas, bahwa bantuan permodalan tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan, tetapi melalui peningkatan skala usaha. Peningkatan skala usaha inilah yang dimaksudkan Riyanto (2001) sebagai fungsi produktif modal.

Untuk kepentingan analisis, bantuan permodalan ditempatkan sebagai variabel independen; peningkatan pendapatan sebagai variabel dependen dan skala usaha sebagai moderating variabel. Sementara itu, pengelolaan usaha ditempatkan sebagai intervening variabel untuk menjelaskan dampak bantuan permodalan terhadap peningkatan skala usaha.

Penempatan variabel independen, dependen, moderating dan intervening dalam kerangka pikir diatas menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya peningkatan pendapatan melalui peningkatan skala usaha, sebagai akibat adanya pengelolaan yang baik terhadap bantuan permodalan. Dalam konteks ini, penting disadari adanya *time lag* atau senjang waktu yang diperlukan, yaitu suatu proses pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Penerima bantuan permodalan, memerlukan waktu tertentu untuk menjalankan usaha. Dalam kurun waktu tersebut, jika pengelolaan usaha dilakukan dengan baik, diharapkan skala usaha akan meningkat. Peningkatan skala usaha dapat diukur dari peningkatan volume transaksi, yang merupakan fungsi dari tingkat perputaran modal usaha. Semakin cepat perputaran modal usaha, volume transaksi semakin meningkat, yang berakibat pada meningkatnya *revenue* (penerimaan). Penerimaan dikurangi biaya menghasilkan keuntungan. Sebagian keuntungan digunakan untuk menambah modal usaha, dan sisanya adalah kontribusi terhadap peningkatan pendapatan.

E. Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan

Satuan analisis (populasi) mencakup seluruh kelompok/individu penerima bantuan permodalan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2008-2014. Adapun satuan pengamatan (sampel) atau bagian dari satuan analisis yang akan diamati ditetapkan sebesar 20 persen dari populasi. Untuk menjamin keterwakilan sampel terhadap populasi, sampling dilakukan dengan teknik *stratified random sampling*. Prosedurnya sebagai berikut:

1. Satuan Pengamatan/Populasi dipilah strata tertentu menurut: tahun penerimaan bantuan permodalan, lokasi (tempat usaha) dan jenis usaha (produksi, perdagangan, jasa)
2. Penetapan kerangka sampling berdasarkan strata atau kelompok populasi
3. Sampel ditetapkan sebesar 20 persen dari setiap strata.
4. Penentuan sumber informasi dari setiap kelompok sampel dilakukan secara acak/random.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara terhadap sumber informasi (sampel) yang dipilih secara acak/random. Untuk kepentingan ini akan disiapkan pedoman wawancara terstruktur. Data sekunder berupa data realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui setiap SKPD terkait pada tahun anggaran 2013. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi dokumenter. Dokumen utama yang dijadikan sumber data adalah laporan realisasi penyaluran Dana PEM tahun anggaran 2013 dan pergulirannya.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua bagian, yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Analisis pendahuluan dimaksudkan untuk menggambarkan realisasi dana PEM dan indikator profil dari setiap variabel. Tujuannya adalah karakteristik usaha dan kecenderungan perkembangan usaha individu penerima bantuan permodalan dapat tergambar dengan baik. Analisis lanjutan dimaksudkan untuk menggambarkan indikator kinerja dari setiap variabel yang dikaji. Tujuannya agar dampak bantuan permodalan terhadap peningkatan kinerja usaha dapat digambarkan dengan baik. Untuk kepentingan ini akan dilakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan terkait skala usaha, tingkat perputaran modal, volume transaksi, tingkat penambahan modal, penerimaan, biaya dan pendapatan bersih.

F.1. Hasil Analisis Pendahuluan

a. Realisasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Realisasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang dilakukan pada tahun 2013 dan 2015, masing-masing sebesar Rp. 14.697.000.000 dan Rp.10.500.000.000.- Realisasi tahun 2015 sedang berjalan, karena itu kajian ini memfokuskan pada realisasi dan perguliran dana PEM tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi dan Perguliran Dana PEM di Kota Kupang Tahun 2013

Keterangan	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penerima	Pengembalian (Rp)	
				Lunas	Sedang Mencuil
Tahun 2013	14.697.000.000	51	3.888	12.937.775.615	1.684.484.385
				88,03%	11,46%
Perguliran I	5.678.000.000		1.236	990.991.933	4.687.008.067
				17,45%	82,55%
Perguliran II	3.320.800.000		465	17.614.600	3.303.185.400
				0,53%	99,47%
Perguliran III	313.000.000		58	7.418.000	305.582.000
				2,37%	97,63%

Sumber: BPM Kota Kupang, 2015 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disampaikan beberapa catatan penting terkait realisasi Dana PEM Tahun 2013 sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana awal sebesar Rp. 14.697.000.000 untuk 3.888 penerima pada 51 kelurahan, telah menciptakan pelipatgandaan melalui perguliran tahap I – III, sehingga jumlah pinjaman yang disalurkan meningkat menjadi Rp. 24.008.800.000 atau bertambah sebesar Rp. 9.311.800.000 (63,36%); sementara itu, jumlah penerima juga meningkat menjadi 5.647 atau bertambah sebanyak 1.759 penerima (45,24%).
- 2) Tingkat pengembalian pada tahap awal cukup baik, yaitu 88,03%, tetapi pada perguliran I, II dan III menunjukkan gejala penurunan. Secara keseluruhan, tingkat pengembalian penyaluran awal dan perguliran (I – III) sebesar 61,12%. Gejala penurunan ini dapat terjadi, mungkin disebabkan perguliran I, II dan III belum memasuki saat jatuh tempo, sehingga para penerima pinjaman sedang dalam proses pengembalian.

b. Gambaran Usaha Sampel Penerima Bantuan

1. Usia dan Tingkat Pendidikan Responden Penerima Bantuan

Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi berada pada usia produktif, dengan proporsi terbesar berada pada rentang usia 39 – 45 tahun. Demikian juga dari segi tingkat pendidikan cukup memadai, dimana sebagian besar responden berpendidikan SMA atau sederajat. Postur usia dan tingkat pendidikan responden seperti ini cukup baik, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial untuk pengembangan usaha diwaktu mendatang.

2. Profil Usaha Responden

a. Jenis Usaha

Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi memilih jenis usaha dagang dan jasa, baik sebelum mendapat bantuan maupun setelah mendapat bantuan. Namun demikian, dari segi jumlahnya, terjadi sedikit pergeseran jenis usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan. Pergeseran usaha terjadi pada usaha jasa, yaitu dari 26,14% menjadi 14,71%; sementara usaha dagang mengalami peningkatan dari 55,23% menjadi 62,09%. Jenis usaha lainnya mengalami pergeseran dengan persentase yang relatif kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa preferensi pilihan usaha yang paling menonjol dikalangan

responden adalah usaha dagang. Hal ini dapat dipahami dari segi alasan responden memilih jenis usaha, dimana sebagian besar responden memilih usaha dengan alasan mudah dikerjakan dan sesuai kemampuan/ketrampilan.

b. Jumlah Bantuan dan Lama Usaha

Menurut ketentuan, jumlah bantuan yang diterima responden berkisar antara Rp.1.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000. Data responden menunjukkan bahwa, dari segi jumlah bantuan, proporsi terbesar responden menerima bantuan < Rp. 5.000.000 dan antara Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000. dari segi lama berusaha, proporsi terbanyak responden telah berusaha antara 4 – 6 tahun. Dilihat dari kecenderungannya, responden dengan pengalaman berusaha yang lebih lama mendapat bantuan modal yang semakin besar. Hal ini dapat dipahami, dan bila dikaitkan dengan volume usaha responden, tampak terdapat kecenderungan, bahwa responden yang telah berusaha lama memiliki volume usaha yang relatif besar. Tampaknya jumlah bantuan yang diberikan kepada responden paralel dengan volume usaha dan lama berusaha.

c. Kinerja Pengembalian Bantuan (Pinjaman)

Pada umumnya tingkat pengembalian cukup baik. Responden yang telah melunasi kewajibannya sebanyak 62,09% dan sedang mencicil sebanyak 37,91%. Total bantuan yang disalurkan kepada seluruh responden sebesar Rp. 1.531.000.000, yang telah dikembalikan (lunas dan sedang mencicil) sebesar Rp. 1.017.760.016 atau 66,48%.

3. Pengelolaan Usaha

a. Gagasan Memulai Usaha dan Perencanaan Usaha

Sebagian besar responden mengaku bahwa usaha yang dijalankan saat ini dipilih berdasarkan inisiatif sendiri, dengan pertimbangan yang paling menonjol adalah mudah dikerjakan (33,01%), sesuai keahlian (36,60%) dan banyak pembeli (16,67%). Fakta ini menunjukkan bahwa, responden sadar atas pilihan jenis usahanya. Pilihan jenis usaha adalah jenis usaha yang mudah dikerjakan, disesuaikan dengan keahlian dan pertimbangan pasar.

Pertimbangan seperti ini memungkinkan responden dapat mengurus usahanya dengan baik, namun pertimbangan demikian juga memiliki kelemahan, yaitu responden hanya fokus pada usaha yang mudah atau bisa dikerjakan, sehingga sebagian besar responden memilih jenis usaha dagang. Jenis usaha lainnya dibidang pengolahan yang sebenarnya memberi nilai tambah yang lebih besar, justru kurang diminati responden. Hal ini tentu berkaitan dengan keahlian/ketrampilan yang dimiliki. Betapapun sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, namun latar belakang pendidikan mereka bersifat umum, sehingga tidak membekali mereka dengan ketrampilan teknis tertentu.

Rencana usaha pada umumnya dibuat sendiri, hanya sebagian kecil responden yang rencana usahanya dibantu orang lain. Pendapat responden bahwa rencana usaha disusun sendiri, sejatinya berkaitan dengan gagasan memulai usaha, di mana mereka memilih jenis usaha atas dasar inisiatif sendiri. Berkaitan dengan rencana usaha, pada tahap awal ketika hendak memulai usaha responden telah memikirkan beberapa aspek penting seperti jenis usaha, tempat usaha, modal usaha dan bagaimana mengelola usaha, tetapi secara formal, penyusunan rencana atau proposal usaha responden mendapat bantuan supervisi dan pemberkasannya oleh Pengelola Dana PEM, Tim Teknis, Tim Ahli dan Fasilitator Kelurahan.

b. Status Kepemilikan Tempat Usaha

Sebagian besar responden memiliki tempat usaha sendiri (84,97%), dan hanya sebagian kecil dengan status sewa (8,17%) dan menggunakan milik orang lain tanpa sewa (6,86%). Pada tahap awal, status tempat usaha milik sendiri dari responden cukup baik, karena responden tidak memerlukan biaya untuk sewa tempat usaha. Akan tetapi kelemahannya, lokasi tempat usaha bukanlah lokasi yang strategis secara ekonomis. Pada umumnya responden menggunakan tempat tinggal dan pekarangan milik sendiri sebagai lokasi tempat usaha. Pada tahap selanjutnya, pengelompokkan tempat usaha pada tempat

tinggal atau pekarangan milik sendiri dapat menimbulkan masalah dari segi aspek lingkungan dan tata ruang. Selain itu, untuk kepentingan pengembangan usaha, tampaknya sulit mengembangkan usaha pada tempat tinggal dan pekarangan milik sendiri, sehingga perlu dipikirkan lokasi tertentu, yang dari segi lingkungan, tata ruang dan kepentingan ekonomi, cocok sebagai tempat usaha.

c. Pelaksanaan Usaha

Pelaksanaan usaha dijelaskan melalui 5 (lima) indikator, yaitu: pelaksana usaha, penggunaan tenaga kerja, sistem upah, curahan waktu kerja dan cara penjualan. Data dari kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa, pengelolaan usaha yang dilakukan responden belumlah optimal. Rinciannya adalah sebagai berikut.

c.1. Pelaksana Usaha

Pada umumnya responden sebagai pelaksana tunggal dalam usahanya, dan tidak menggunakan bantuan orang lain dalam mengelola usahanya (77,45%); responden yang melaksanakan usaha dibantu orang lain sebanyak 22,55%. Alasan utama responden tidak menggunakan bantuan orang lain adalah kegiatan masih terbatas sehingga dapat diurus sendiri (79,32%) dan belum mampu memberi upah tenaga kerja (20,68%). Kondisi demikian menunjukkan bahwa skala usaha atau aktivitas usaha responden masih terbatas atau relatif kecil, sehingga segala sesuatu masih dapat dikerjakan sendiri.

c.2. Penggunaan Tenaga Kerja dan Sistem Upah

Jumlah responden yang tidak menggunakan tenaga kerja dalam mengelola usahanya sebanyak 77,45%; sementara itu responden yang menggunakan tenaga kerja antara 1 – 2 orang sebanyak 18,95% dan responden yang menggunakan tenaga kerja antara 3 – 4 orang sebanyak 3,59%. sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2
Penggunaan Tenaga Kerja dan Sistem Upah

Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah	%	Sistem Upah	Jumlah	%
Tidak ada TK	237	77,45	Tidak ada TK	237	77,45
1 - 2 Orang	58	18,95	Harian	22	7,19
3 - 4 Orang	11	3,60	Mingguan	16	5,23
Jumlah=	306	100,00	Bulanan	30	9,80
			Bagi Hasil	1	0,33
			Jumlah=	306	100,00

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Dari 22,55% responden yang menggunakan tenaga kerja, sistem upah yang diterapkan pada umumnya terdiri dari upah harian, upah mingguan dan upah bulanan. Tercatat hanya 1 (satu) responden yang menggunakan sistem bagi hasil. Terlepas dari jumlah tenaga kerja yang digunakan, penerapan sistem upah sebagaimana disebutkan, menunjukkan bahwa, responden sebagai pemilik usaha telah menciptakan suatu sistem balas jasa yang memberi kepastian bagi pekerja. Hal ini merupakan indikasi yang baik, terutama dari sisi pengelolaan usaha secara profesional.

c.3. Curahan Waktu Kerja dan Cara Penjualan

Curahan waktu kerja responden bervariasi, 41,83% bekerja antara 1 – 6 jam per hari; dan 44,44% bekerja antara 7 – 12 jam per hari. Terdapat sebagian kecil responden yang bekerja cukup maksimal, yaitu antara 13 – 18 jam per hari (12,09%). Data ini menunjukkan bahwa, masih terdapat proporsi responden yang cukup besar, yang belum bekerja optimal.

Mereka hanya bekerja kurang dari 6 (enam) jam per hari; berarti masih terdapat waktu luang yang relatif besar. Pada umumnya responden pada kategori ini beralasan bahwa, kegiatan usaha mereka masih terbatas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu yang relatif pendek, dan pada waktu-waktu tertentu, karena hari libur dan urusan keluarga, kegiatan usaha mereka ditutup. Hal ini secara keseluruhan menggambarkan etos kerja yang belum memadai.

Walaupun demikian, terdapat juga proporsi responden yang telah menggunakan waktu kerja secara optimal antara 7 – 12 jam dan bahkan antara 13 – 18 jam per hari. Perbedaan curahan waktu kerja tersebut paralel skala usaha. Pada responden dengan jumlah modal < Rp. 5.000.000 curahan waktu kerja relatif pendek per hari, sementara pada responden dengan jumlah modal > Rp. 5.000.000, curahan waktu kerja relatif lebih lama.

Cara penjualan pada umumnya dilakukan secara tunai. Hal ini tentu terkait dengan usaha responden yang sebagian besar berdagang, dengan skala usaha atau jumlah modal < Rp.5.000.000.- Pilihan cara penjualan tunai bagi mereka dapat dipahami, mengingat jumlah modal dan persediaan yang terbatas, sehingga penjualan dengan cara kredit dapat menghambat kelangsungan usaha mereka. Pada responden yang menerapkan cara penjualan tunai dan kredit, jumlah modal dan persediaan relatif besar, sehingga tidak menghadapi kesulitan dalam menerapkan cara penjualan tunai dan kredit sekaligus; bahkan dengan penjualan kredit, omzet penjualannya menjadi relatif besar. Penerapan cara penjualan tunai dan kredit secara bersamaan, sejatinya dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan usaha. Responden yang mampu menerapkan cara penjualan tunai dan kredit cenderung memiliki usaha dengan skala dan omzet penjualan yang lebih besar; hal ini akan berdampak pada pendapatan yang lebih besar pula.

c.4. Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan dijelaskan melalui 4 (empat) indikator, yaitu pencatatan atas transaksi, penyimpanan pemasukan setiap hari, perhitungan keuntungan dan pemisahan pengeluaran. Data keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa, faktor penatausahaan keuangan belum dilakukan secara baik oleh responden. Rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Transaksi dan Penyimpanan Pemasukan

Pencatatan transaksi usaha belum dilakukan secara tertib oleh responden. Pada umumnya (66,34%) responden tidak mencatat atau hanya kadang-kadang saja mencatat transaksi setiap hari. Hanya 32,03% responden yang melakukan pencatatan transaksi secara teratur. Pemasukan dari transaksi setiap hari pada umumnya dipegang sendiri (71,24%); hanya sebagian kecil responden (25,16%) yang menyimpan pemasukan di Bank/Koperasi.

Ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi menunjukkan bahwa, aspek pengendalian usaha belum dilakukan dengan baik. Hal ini terutama terdapat pada responden dengan jumlah modal < Rp. 5.000.000, di mana volume transaksi yang terjadi relatif kecil, sehingga dalam mengendalikan usaha, responden lebih mengandalkan faktor ingatan dibanding pencatatan. Hal ini juga tampak pada penyimpanan pemasukan dari transaksi setiap hari. Sebagian besar responden (71,24%) menyimpan sendiri pemasukan setiap hari; hanya 25,16% responden yang menyimpan di bank/koperasi. Gejala ini menunjukkan bahwa, cara responden mengamankan asetnya masih bersifat tradisional, dan sangat rawan dari segi keamanan.

2. Perhitungan Keuntungan dan Pemisahan Pengeluaran

Keteraturan responden dalam melakukan perhitungan atas transaksi (uang masuk dan Keluar) setiap hari belum memadai. Hanya 26,47% responden yang secara teratur melakukan perhitungan atas keuntungan yang diperoleh; sebagian besar 73,53% responden belum melakukan perhitungan keuntungan secara teratur. Ketidakteraturan ini menyebabkan responden tidak mengetahui secara tepat; seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan usaha yang dibuat responden hanya didasarkan pada

berapa banyak uang tunai yang tersedia, bukan hasil perhitungan rugi/laba. Keputusan usaha yang dibuat dengan cara seperti ini masih dimungkinkan untuk skala usaha yang relatif kecil. Namun untuk kepentingan pengembangan usaha atau bagi responden dengan skala usaha yang relatif besar, pembuatan keputusan usaha dengan cara seperti ini mengandung resiko kesalahan yang relatif besar. Paralel dengan perhitungan keuntungan, dalam hal pemisahan pengeluaran, khususnya pengeluaran pribadi dan usaha, belum dipisahkan dengan baik oleh responden. Hanya 24,84% responden yang membuat pemisahan jelas antara pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan usaha. Sebagian besar responden (75,16%) tidak melakukan pemisahan atau kadang-kadang saja melakukan pemisahan.

Data di atas sejalan dengan fakta yang telah dikemukakan, bahwa sebagian besar responden memegang sendiri pemasukannya. Dalam kondisi demikian, responden akan mengalami kesulitan untuk membedakan pengeluarannya. Akibatnya, pengeluaran menjadi tidak terkendali dengan baik. Namun demikian, terdapat juga sebagian kecil responden (24,84%) yang mampu melakukan pemisahan dengan baik pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan pengeluaran untuk kepentingan usaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa, hanya sebagian kecil responden yang dapat bersikap profesional terhadap pengelolaan keuangannya.

F.2. Hasil Analisis Lanjutan

a. Perkembangan Skala Usaha

Perkembangan skala usaha responden dijelaskan melalui 3 (tiga) indikator, yaitu perkembangan modal usaha, persediaan usaha dan piutang usaha. Hasil analisis data ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa, skala usaha responden cenderung mengalami peningkatan. Rinciannya adalah sebagai berikut.

a.1. Perkembangan Modal Usaha

Setelah mendapat bantuan dan memanfaatkannya lebih kurang 2 (dua) tahun, modal usaha responden memperlihatkan perubahan yang cukup baik. Pada awal usaha, proporsi responden dengan modal usaha kurang dari Rp. 5.000.000 sangat dominan, yaitu sebanyak 66,99%; namun pada saat ini sebanyak 34,31% atau berkurang sebanyak 32,68%; sementara responden dengan kategori modal usaha antara Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 mengalami kenaikan dari 18,95% (saat memulai usaha) menjadi 24,18% (saat ini).

Pada kategori modal usaha yang lebih besar, juga terlihat perubahan yang cukup baik. Responden dengan modal usaha antara Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 dan antara Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000, masing-masing meningkat dari 4,58% menjadi 16,99% dan 3,59% menjadi 14,05%. Sementara responden dengan jumlah modal usaha di atas Rp. 20.000.000 meningkat dari 5,88% menjadi 10,46%.

Data di atas menunjukkan bahwa, jumlah responden dengan modal usaha yang relatif kecil yaitu kurang dari Rp. 5.000.000 semakin berkurang; sementara responden dengan modal usaha yang lebih besar mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, rata-rata modal usaha responden awal usaha sebesar Rp. 5.646.191; meningkat menjadi Rp. 12.088.933. Gejala ini menunjukkan hasil nyata yang cukup baik dari implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan proses akumulasi kapital pada responden.

a.2. Perkembangan Persediaan Usaha

Persediaan usaha adalah bagian dari modal usaha. Peningkatan persediaan mengindikasikan peningkatan dalam skala usaha. Pada awal memulai usaha, jumlah persediaan usaha responden pada kategori kurang dari Rp. 5.000.000 sebanyak 64,71%; pada saat ini sebanyak 46,73%; atau mengalami penurunan sebanyak 17,97%. Pada kategori persediaan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000, meningkat dari 18,30% menjadi 22,88% dan pada kategori yang lebih besar yaitu Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 meningkat dari 10,46% menjadi 18,95%. Secara keseluruhan, rata-rata persediaan usaha pada awal usaha sebesar Rp.

3.563.153, saat ini meningkat menjadi Rp. 9.498.614 Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan persediaan usaha responden setelah mendapat bantuan yang telah dikelola lebih kurang 2 (dua) tahun.

a.3. Perkembangan Piutang Usaha

Piutang usaha terjadi karena penggunaan sistem penjualan kredit. Adanya piutang menerangkan tentang volume usaha; semakin besar piutang, volume usaha cenderung membesar. Dari 306 responden, hanya 69 responden yang menerapkan sistem penjualan dengan kredit serta kombinasi tunai dan kredit. Pada saat memulai usaha, 50,72% responden memiliki piutang usaha kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 50,72%, kemudian menurun menjadi 40,58%. Pada kategori piutang antara Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 juga berkurang dari 39,13% menjadi 24,64%; namun pada kategori piutang usaha yang lebih besar yaitu Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000, jumlah responden meningkat dari 4,35% menjadi 20,29% atau naik sebesar 15,94%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah piutang usaha responden meningkat, mengindikasikan adanya peningkatan volume usaha.

b. Pendapatan Responden Penerima Bantuan

b.1. Omzet Penjualan, Biaya Produksi dan Penerimaan Bersih

Omzet penjualan per bulan responden menunjukkan gejala peningkatan yang cukup baik. Pada saat memulai usaha, omzet penjualan responden yang kurang dari Rp. 5.000.000 per bulan sebanyak 48,69%; kemudian saat ini menjadi 39,54%, atau berkurang sebanyak 9,15%. Pada kategori omzet penjualan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 per bulan, jumlah responden meningkat dari 32,35% menjadi 36,60% atau naik 4,25%. Pada kategori omzet penjualan yang lebih tinggi, yaitu Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 meningkat dari 9,15% menjadi 11,44% atau naik 2,29%, demikian juga gejala peningkatan omzet penjualan terjadi pada kategori yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, rata-rata omzet penjualan responden mengalami peningkatan dari Rp.39.796.875 (saat mulai usaha) menjadi Rp. 61.308.511 (saat ini); yang berarti skala usaha juga mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan modal yang telah dikelola lebih kurang 2 tahun.

Tabel 3
Perkembangan Omzet Penjualan Responden

Kategori	Omzet Penjualan per Bulan Awal Usaha		Omzet Penjualan per Bulan Saat Ini		Perubahan (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
< 5.000.000	149	48,69	121	39,54	-9,15
5.000.000 - 10.000.000	99	32,35	112	36,60	4,25
10.000.000 - 15.000.000	28	9,15	35	11,44	2,29
15.000.000 - 20.000.000	21	6,86	24	7,84	0,98
20.000.000 - 25.000.000	6	1,96	9	2,94	0,98
≥ 25.000.000	3	0,98	5	1,63	0,65
Jumlah	306	100,00	306	100,00	==

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Sejalan dengan peningkatan omzet penjualan, biaya produksi juga mengalami kenaikan, namun dengan jumlah yang relatif lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan yang cukup. Secara keseluruhan, rata-rata omzet penjualan responden per bulan sebesar Rp. 15.361.928 dan biaya produksi rata-rata sebesar Rp. 7.611.438, menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 7.751.961 per bulan. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh bantuan permodalan yang diterima terhadap perkembangan kinerja usaha responden.

Tabel 4
Gambaran Omzet Penjualan, Biaya Produksi dan Penerimaan Bersih Responden

Kategori	Omzet Penjualan per Bulan Saat Ini		Biaya Propduksi per Bulan		Penerimaan Bersih per Bulan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 5.000.000	71	23,20	157	51,31	156	50,98
5.000.000 - 10.000.000	86	28,10	58	18,95	61	19,93
10.000.000 - 15.000.000	11	3,59	40	13,07	49	16,01
15.000.000 - 20.000.000	45	14,71	24	7,84	17	5,56
20.000.000 - 25.000.000	43	14,05	27	8,82	20	6,54
≥ 25.000.000	50	16,34	0	0,00	3	0,98
Jumlah	306	100,00	306	100,00	306	100,00
Rata-rata (Rp)	15.361.928	--	7.611.438	--	7.751.961	--

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

b.2. Penggunaan Penerimaan Bersih Usaha

Rata-rata penerimaan bersih usaha seluruh responden sebesar Rp. 7.751.961 per bulan. Penerimaan bersih atau keuntungan tersebut, rata-rata Rp. 2.648.039 (34,16%) per bulan digunakan untuk menambah modal, dan rata-rata Rp. 5.103.922 (65,84%) digunakan untuk menambah pendapatan keluarga dan digunakan untuk konsumsi. Dilihat dari proporsinya, jumlah penerimaan bersih usaha yang digunakan menambah modal relatif lebih kecil dibanding untuk kepentingan konsumsi. Namun demikian, gambaran ini menunjukkan adanya pengaruh dari pemberian bantuan permodalan terhadap pendapatan responden.

Tabel 5
Gambaran Proporsi Penggunaan Penerimaan Bersih Usaha Responden

Kategori	Penggunaan Pendapatan untuk Menambah Modal		Penggunaan Pendapatan untuk pribadi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
< 3.000.000	177	57,84	156	50,98
3.000.000 - 6.000.000	35	11,44	88	28,76
6.000.000 - 9.000.000	52	16,99	25	8,17
9.000.000 - 12.000.000	23	7,52	22	7,19
12.000.000 - 15.000.000	19	6,21	14	4,58
≥ 15.000.000		0,00	1	0,33
Jumlah	306	100,00	306	100,00
Rata-rata (Rp)	2.648.039	34,16	5.103.922	65,84

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

F.3. Elaborasi Hasil Analisis Data

a) Pilihan Jenis Usaha

Tiga jenis usaha yang paling menonjol dipilih responden penerima bantuan adalah usaha perdagangan (62,09%); usaha jasa (14,71%) dan usaha industri makanan (10,46%). Dibanding dengan jenis usaha responden sebelum menerima bantuan sebenarnya tidak berbeda; perbedaan hanya terdapat pada persentasenya, di mana responden yang berusaha dagang sebelumnya sebanyak 55,23%, setelah mendapat bantuan meningkat menjadi 62,09%; kemudian responden yang bergerak dibidang industri makanan sedikit meningkat dari 8,50% menjadi 10,46%; sementara itu responden yang bergerak dibidang jasa menurun dari 26,14% menjadi 14,71%. Perubahan persentase ini menunjukkan bahwa, terdapat responden yang beralih usaha dari jasa ke perdagangan.

Peralihan usaha ini dapat dipahami, mengingat dengan latar belakang pendidikan yang bersifat umum, usaha yang paling mungkin dipilih adalah perdagangan; sementara usaha lainnya yang membutuhkan keahlian teknis tertentu seperti kerajinan dan perbengkelan relatif tidak berubah. Dengan kecenderungan demikian, di waktu mendatang, akan semakin banyak orang yang bergerak dibidang perdagangan. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi, sehingga dikuatirkan akan banyak pelaku usaha yang akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini perlu diantisipasi dengan cara mendorong penerima bantuan berikutnya untuk memasuki jenis usaha lain, utamanya jenis usaha dengan ketrampilan teknis tertentu, dimana pangsa pasarnya masih terbuka, pelaku usahanya relatif terbatas, dan nilai yang diperoleh relatif tinggi. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang melalui dinas terkait, perlu menyiapkan paket-paket pelatihan ketrampilan, yang memungkinkan para penerima bantuan berikutnya dapat memasuki usaha seperti industri pengolahan skala mikro dan kecil, pertukangan, perbengkelan, kerajinan dan sektor produksi lainnya.

b) Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha responden pada umumnya belum baik, utamanya berkaitan dengan pilihan tempat usaha, curahan waktu kerja, pelaksanaan usaha dan penatausahaan keuangan.

1. Pilihan Tempat Usaha

Kelompok responden yang paling dominan yaitu usaha dagang, pada umumnya memilih tempat usaha dirumah atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendirikan tempat usaha. Pilihan ini sesuai dengan kemampuan responden, tetapi kurang memperhitungkan keberadaan pembeli. Dengan kecenderungan penambahan usaha dagang yang semakin tinggi, dapat mengakibatkan penumpukan usaha pada areal tertentu disekitar pemukiman. Pada sisi lain, dengan kondisi kepadatan permukiman yang semakin tinggi, dapat menimbulkan gangguan dari segi lingkungan dan penataan ruang.

Untuk mengantisipasi gangguan terhadap lingkungan dan penataan ruang, serta untuk menciptakan kelancaran arus orang dan kendaraan, terutama untuk kepentingan evakuasi bila terjadi kondisi ekstrim tertentu, maka perlu dipikirkan penempatan usaha pada areal tertentu.

2. Pelaksanaan Usaha

Sebagian besar responden (77,45%) mengerjakan usahanya sendiri (tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggunakan tenaga kerja). Hal ini sesuai dengan kondisi usaha dan kemampuan mereka yang relatif terbatas. Kondisi demikian mengharuskan responden harus menyiapkan semua hal berkaitan dengan usahanya, akibatnya waktu menjalankan usaha relatif terbatas. Masih terdapat proporsi responden yang cukup besar (41,83%) dengan curahan waktu kerjanya belum optimal, yaitu antara 1 – 6 jam dalam satu hari.

Mengerjakan usaha sendiri dalam kondisi dimana skala usaha masih relatif kecil, merupakan pilihan yang rasional. Namun dalam kaitannya dengan curahan waktu kerja, sejatinya responden masih dapat menambah jam kerja, terutama pada responden yang bergerak dibidang perdagangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kelompok responden ini kerap menutup usahanya, karena terdapat acara lain yang harus diikuti, dan terdapat juga responden yang secara sadar tidak menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu. Pada kelompok responden jenis ini, perbaikan etos kerja melalui pendampingan menjadi sangat penting, agar mereka dapat mengoptimalkan curahan waktu kerjanya.

3. Penatausahaan Keuangan

Pada umumnya responden belum mempraktikkan penatausahaan keuangan dengan baik. Proporsi responden yang tidak melakukan pencatatan usaha secara teratur sebanyak 66,34%; yang tidak perhitungan rugi/laba secara teratur sebanyak 73,53% dan yang belum melakukan pemisahan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan usaha sebanyak 75,16%.

Praktik penatausahaan keuangan seperti ini menyebabkan pengendalian usaha tidak dapat dilakukan dengan baik dan pengamanan aset usaha kurang memadai. Dampaknya adalah responden akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat; seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan usaha yang dibuat responden hanya didasarkan pada berapa banyak uang tunai yang tersedia, bukan hasil perhitungan rugi/laba. Keputusan usaha yang dibuat dengan cara seperti ini masih dimungkinkan untuk skala usaha yang relatif kecil, namun sejalan dengan semakin besarnya skala usaha, praktik penatausahaan keuangan seperti ini sangat rawan terhadap praktik salah urus.

Untuk mengatasi hal ini, pendampingan terhadap responden untuk perbaikan penatausahaan keuangan perlu dipikirkan dengan baik. Berdasarkan pengalaman, peningkatan kemampuan responden dalam penatausahaan keuangan akan efektif bila dilakukan melalui proses *learning by doing* (belajar sambil bekerja). Metode yang paling tepat untuk memastikan *learning by doing* dapat berjalan baik adalah pendampingan.

c) Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha responden dilihat dari segi pertambahan modal usaha, persediaan usaha dan piutang usaha cukup baik. Pada sisi lain, pengelolaan usaha responden pada umumnya belum baik. Hal ini dimungkinkan, karena skala usaha sebagian besar responden masih terbatas, sehingga pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan usaha masih dapat dilakukan tanpa dokumentasi yang lengkap. Dengan mengandalkan apa yang diingat, dilihat dan dirasakan, responden dapat membuat keputusan dalam melaksanakan usaha.

Kondisi demikian tentunya tidak dapat dipertahankan terus. Sejalan dengan perkembangan usaha, praktik penatausahaan keuangan yang baik mensyaratkan adanya catatan tentang semua transaksi usaha. Catatan yang dimaksud dapat dibuat pada format-format yang sederhana. Kuncinya terletak pada kemauan dan kedisiplinan responden untuk melakukan pencatatan. Dengan tingkat pendidikan yang relatif baik, sejatinya responden dapat diperkuat melalui pendampingan untuk menerapkan praktik pengelolaan, pelaksanaan usaha serta penatausahaan keuangan yang baik.

d) Pendapatan Responden

Rata-rata penerimaan bersih usaha seluruh responden sebesar Rp. 7.751.961 per bulan. Angka rata-rata ini didapatkan dari selang interval penerimaan bersih usaha paling rendah sebesar Rp. 1.200.000 per bulan dan penerimaan bersih usaha paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.- per bulan. Penerimaan bersih atau keuntungan tersebut, rata-rata Rp. 2.648.039 (34,16%) per bulan digunakan untuk menambah modal, dan rata-rata Rp. 5.103.922 (65,84%) digunakan untuk menambah pendapatan keluarga dan digunakan untuk konsumsi.

Dilihat dari proporsinya, jumlah penerimaan bersih usaha yang digunakan menambah modal relatif lebih kecil dibanding untuk kepentingan konsumsi. Hal ini dapat dipahami, karena sebagian responden secara riil memiliki pendapatan yang relatif kecil. Secara teoretis, hal ini dapat dibenarkan, bahwa dalam kondisi dimana pendapatan rumah tangga relatif kecil, bagian terbesar dari pendapatannya akan digunakan untuk konsumsi;

sebaliknya dalam kondisi dimana pendapatan rumah tangga relatif tinggi, proporsi pendapatan yang dikonsumsi akan lebih rendah dibanding proporsi yang ditabung.

Dalam kaitan dengan pengembangan usaha responden, diperlukan adanya akumulasi kapital yang berasal dari pendapatannya sendiri. Karena itu, upaya untuk terus mendorong responden dalam meningkatkan pendapatannya melalui pendampingan untuk perbaikan proses pelaksanaan usaha, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perbaikan dalam proses pelaksanaan usaha akan menciptakan efisiensi usaha dan dampaknya akan tampak pada peningkatan pendapatan responden. Semakin meningkat pendapatan responden, proporsi pendapatan yang digunakan untuk menambah modal akan semakin besar, sehingga memberi peluang bagi mereka untuk memperbesar kapasitas usahanya.

G. Kesimpulan Hasil Kajian

Berdasarkan penyampaian hasil analisis data dan elaborasi hasil analisis yang telah disampaikan pada bab terdahulu, berikut ini dapat disampaikan kesimpulan hasil kajian sebagai berikut.

1. Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 2013

Pada tahun 2013, dialokasi anggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 15.000.000.000.- dan berhasil disalurkan Rp. 14.697.000.000 atau 97,98%, sisanya sebesar Rp. 74.740.000 (2,12%) adalah dana *force majeure*. Tingkat pengembalian (lunas) relatif tinggi, yaitu 88,03%; sisanya sedang dalam proses mencicil. Perguliran dana berjalan baik; tercatat telah 3 (tiga) kali perguliran, dengan akumulasi penyaluran sebesar Rp. 9.311.800.000 atau 63,36% dari penyaluran awal.

2. Profil Responden Penerima Dana PEM

Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi berada pada usia produktif dan berpendidikan cukup memadai. Sebagian besar responden memilih usaha dagang dan jasa, dengan jumlah bantuan terbesar pada kategori Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000.-

3. Pengelolaan Usaha

Sebagian besar responden memilih jenis usaha atas inisiatif sendiri, dengan pertimbangan utama mudah dikerjakan dan sesuai keahlian/pengalaman; sebagian besar responden memiliki tempat usaha dengan status milik sendiri dan sebagian besar responden mengelola sendiri usahanya; responden yang menggunakan tenaga kerja relatif sedikit. Adapun waktu yang digunakan responden untuk berusaha relatif pendek; sekitar 44,44% responden bekerja antara 1 – 6 jam per hari. Pada umumnya responden menjual secara tunai, hanya sebagian kecil responden dengan modal yang relatif besar yang menggunakan penjualan tunai dan kredit.

Pencatatan usaha belum dilakukan secara tertib dan teratur oleh responden. Sebagian besar responden belum menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil transaksi setiap hari/minggu, dan sebagian besar responden tidak melakukan perhitungan selisih transaksi setiap harinya. Sebagian besar responden tidak tertib dalam memisahkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha.

4. Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 2013

a. Perkembangan Skala Usaha Responden

- Rata-rata skala usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan di atas Rp. 10.000.000.-
 - Rata-rata persediaan usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan di atas Rp. 10.000.000.-
 - Rata-rata piutang usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan di atas Rp. 10.000.000.-
-

b. Pendapatan Responden

- Rata-rata omzet penjualan responden meningkat, berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan; dengan rata-rata pendapatan bersih Rp. 7.751.961. Namun perlu dicatat bahwa kontribusi terbesar terhadap keuntungan rata-rata diberikan oleh responden dengan modal di atas Rp. 10.000.000 dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000.-
- Sebagian besar responden menggunakan pendapatan bersihnya untuk konsumsi (65,84%); dan 34,16% digunakan untuk menambah modal.
- Pada umumnya responden dengan modal di atas Rp. 10.000.000 dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000.- menggunakan presentase pendapatan bersih usaha yang lebih besar untuk menambah modal.

H. Rekomendasi Pengembangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam Bab IV, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi pokok untuk pengembangan sebagai berikut.

a) Tahap Perencanaan

1. Pilihan Jenis Usaha

Diluar usaha dagang, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu mengkaji untuk mengidentifikasi usaha-usaha produktif berbasis ketrampilan tertentu yang dari sisi penawaran masih tersedia pangsa yang relatif besar dan memiliki nilai tambah tinggi. Identifikasi usaha produktif ini berguna untuk mendorong calon penerima bantuan atau penerima bantuan (*on going*) dapat melakukan diversifikasi usaha.

2. Batas Kelayakan Jumlah Bantuan Modal

Para penerima bantuan kurang dari Rp. 5.000.000.- tampaknya mengalami kesulitan untuk melakukan akumulasi modal, sehingga setelah masa pelunasan, mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu perlu ditetapkan batas minimum bantuan modal yang feasible secara ekonomis, agar terdapat margin keuntungan yang cukup untuk pembentukan modal. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar batas bantuan modal minimum adalah Rp. 5.000.000. Dengan tingkat perputaran sebesar 3 (tiga) kali, omzet penjualan akan mencapai minimum Rp.15.000.000.- per bulan, sehingga terdapat margin keuntungan yang cukup untuk ditabung (menambah modal).

3. Penyiapan Penerima Bantuan

Bagi calon penerima pertama (baru) dari penyaluran bantuan awal maupun perguliran, perlu dikembangkan semacam *capacity building* bagi calon penerima bantuan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan kepengelolaan usaha yang didasarkan pada proposal usaha yang diajukan.

b) Tahap Pelaksanaan

1. Pemilihan Tempat Usaha

Diperlukan koordinasi lintas SKPD agar dapat ditetapkan lokasi tempat usaha yang terkonsentrasi (pada aras kelurahan atau kecamatan) dan penyediaan infrastruktur yang memadai, agar penambahan jumlah penerima bantuan dapat memperoleh tempat usaha yang sesuai kemampuan dan memadai untuk pelaksanaan usahanya.

2. Pelaksanaan Usaha

- Bagi penerima bantuan dengan kategori jumlah modal dan omzet penjualan kurang dari Rp. 15.000.000, pilihan melaksanakan pekerjaan sendiri cukup efisien dari segi pembiayaan, tetapi pemanfaatan waktu kerja belum optimal. Disarankan agar waktu kerja yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Bagi penerima bantuan dengan kategori modal usaha dan omzet penjualan di atas Rp.15.000.000 yang tidak menggunakan tenaga kerja, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan tenaga kerja untuk menjamin keteraturan dan keberlanjutan kegiatan usaha serta meningkatkan omzet penjualan.

c) Penatausahaan Keuangan

1. Penatausahaan kegiatan para penerima bantuan, utamanya pencatatan dan pelaporan transaksi serta pemisahan pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi dan usaha perlu mendapat perbaikan. Dalam kaitan ini, proses pendampingan untuk perbaikan praktik penatausahaan keuangan, terutama oleh fasilitator keluarahan menjadi sangat penting.
2. Dalam kaitan ini, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu melaksanakan *capacity building* bagi fasilitator kelurahan, agar efektif dalam melaksanakan pendampingan.

d) Periode Pengembalian Bantuan Modal

Batas pengembalian bantuan selama 12 kali cicilan (1 tahun) dirasakan relatif berat bagi para penerima bantuan, karena itu disarankan agar batas pengembalian bantuan modal diperpanjang menjadi 20 kali cicilan (20 bulan), agar beban cicilan menjadi lebih ringan.

e) Pengembangan usaha

1. Pembiayaan Lanjutan

- Responden pada kategori jumlah modal kurang dari Rp. 15.000.000 masih menghadapi kendala untuk melakukan akumulasi kapital pasca pelunasan. Kepada mereka disarankan agar dapat memperoleh pembiayaan lanjutan, terutama melalui perguliran untuk peningkatan modal usaha dan skala usaha.
- Bagi responden dengan jumlah modal usaha di atas Rp. 15.000.000, disarankan untuk melakukan diversifikasi usaha untuk percepatan pengembangan usaha, baik melalui pembiayaan lanjutan (melalui perguliran) maupun pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial.
- Untuk kepentingan ini, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu melakukan kajian untuk memastikan penerima bantuan yang memiliki prospek usaha baik dan patut mendapatkan pembiayaan lanjutan, baik untuk peningkatan skala usaha maupun diversifikasi usaha.

2. Model Pengembangan Usaha

- Para penerima bantuan melalui dana PEM dalam kenyataannya melaksanakan usaha secara individual, sehingga tidak terdapat sinergi antar pelaku usaha. Ke depan, perlu dikembangkan model pengembangan usaha yang dapat menciptakan keterkaitan usaha diantara para penerima bantuan. Untuk itu disarankan agar model pengembangan usaha dengan pola klaster bisnis atau klaster bisnis.
- Pengembangan usaha dengan klaster bisnis atau klaster industri pada dasarnya membagi pelaku ekonomi pada 3 (tiga) segmen dalam matrantai usaha, yaitu pada segmen pemasok (bahan mentah dan setengah jadi), produsen (penghasil) dan penjual. Pola ini perlu dibakukan dalam Petunjuk Pelaksanaan, sehingga menjadi rujukan bagi Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli dalam menyiapkan dan mengembangkan usaha para penerima dana PEM.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous., 2005. *Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Biro Kredit Bank Indonesia.

- Anonimous.,2006. *Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah (FPESD), Best Practice Pengembangan Klaster di Jawa Tengah. (working paper)*
- Anonimous., 2006. *Laporan Akhir Kajian Pembiayaan Dalam Rangka Pengembangan Klaster*. Biro Kredit Bank Indonesia.
- Ardiansyah, Saleh., 2007. *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indah
- Badrudin, Hanafi, dkk., 2010. *Keefektivan Pemanfaatan Bantuan Permodalan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Usaha Pelaku Ekonomi Kecil, Studi Kasus di Kota Solo*; Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, UNS Solo.
- Handoko, Siswoyo., 2011. *Penuntun Penatausahaan Keuangan bagi Usaha Mikro dan Kecil; Model Pelatihan Kewirausahaan*, Malang: Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Unibraw Malang.
- Mahman, Syamsurizal dan Zuriati., 2004. *Modul Lokalatih Pembentukan Dan Pengembangan Klaster Ekonomi Lokal* (Editor: Dr. Ir. Astia Dendi) PROMIS-NT - GTZ
- Munawir, S., 2001. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta; Liberty Press.
- Riyanto, Bambang., 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta; BPFE UGM
- Supratikno, H., 2002. *The Strategies of Cluster Upgrading in Central Java*. Salatiga: Preliminary Report to Deperindag.
- Tambunan, Tulus., 2009. *Kerangka Konseptual Model Pengembangan Usaha Mikro-Kecil; Bahan Lokakarya Pengembangan Usaha Mikro-Kecil*, Jakarta: Badan Litbang Dep. Koperasi dan UKM.
- Taufik, T.A., 2007. *Pengenalan tentang Bagaimana Mengembangkan Klaster Industri di Daerah*. Palu: Presentasi Sosialisasi tentang Klaster Industri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, No, 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Keputusan Walikota Kupang No. 1/Kep/HK/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kupang No. 15A/Kep/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang
-